

KAJIAN MODEL PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL

D E M A S W A M A E R
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Papua

ABSTRAK

Distrik Demta Kabupaten Jayapura Provinsi Papua telah dilakukan survei bulan Juli 2006 dengan pendekatan FGD (*Focus Discussion Group*) yang bertujuan mempelajari karakteristik masyarakat tani menurut spesifikasi inovasi pembangunan yang ditawarkan untuk diadopsi dan juga mempelajari kemungkinan digunakannya kelembagaan adat untuk menyusun model penyuluhan yang sesuai dengan wilayah yang bersangkutan. Hasil survei menunjukkan bahwa kelembagaan-kelembagaan masyarakat adat selama ini terlihat makin redup karena terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat adat sebagai akibat dari masuknya kelembagaan modern seperti pemerintahan desa yang bersifat formal, koperasi unit desa, lembaga penyuluhan dan lain-lain. Namun masyarakat adat tidak tinggal diam dan menerima begitu saja perubahan yang terjadi karena mulai terlihat upaya mereka merevitalisasi kelembagaan adat yang sekarang dikenal sebagai DAK (Dewan Adat Kampung) melalui forum resmi Dewan Adat Papua (DAP) yang disokong pemerintah daerah Provinsi Papua. Dengan muncul era otonomi khusus (Otsus) bagi Papua yang memberi kesempatan kepada lembaga adat untuk mengkonsolidasikan diri agar ikut berperan dalam mendorong perubahan masyarakat adat, tidak saja dalam bidang sosial budaya, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk menjalin keterkaitan hubungan antara kelembagaan lokal masyarakat adat (DAK) dengan kelembagaan baru yang telah dibentuk badan resmi pemerintah, seperti kelembagaan penyuluhan dan koperasi unit desa, untuk membangun desa secara terpadu baik melalui program pemerintahan desa dan program masyarakat adat yang diharapkan berjalan seiring, sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kata Kunci : *Dewan Adat Kampung, Model Penyuluhan Pertanian.*

PENDAHULUAN

Peran penyuluhan dalam menyongsong era tinggal landas pembangunan nasional merupakan hal yang tidak mungkin lagi ditawar-tawar, sehingga penyuluhan (pertanian) harus diselenggarakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan penyuluhan boleh ada, boleh tidak ada, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Persepsi semacam ini mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan makna penyuluhan dan implementasinya di lapangan. Selanjutnya pemikiran seperti ini juga berakibat fatal dalam menentukan porsi dan kedudukan penyuluhan dalam konteks pembangunan berdimensi luas (Hubeis *et al.*, 1995). Pandangan ini menjadi dasar untuk mempertimbangkan perlunya memahami peran penyuluhan pertanian di Papua atau secara khusus daerah Jayapura, dimana penduduk asli kawasan Jayapura terdiri dari 45 suku besar dengan 43 bahasa daerah Uncen (1991), sehingga barangkali akan menyulitkan kita untuk mengembangkan penyuluhan bagi masyarakat lokal dengan pendekatan budaya sebagaimana yang belakangan ini mulai diwacanakan bahwa nilai-nilai budaya memiliki peran yang cukup strategis dalam membentuk kemajuan manusia (Harrison dan Huntington, 2006).

Daerah Kabupaten Jayapura merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sosial, terutama sebagai ibu kota provinsi, yang jika tidak dikelola dengan bijaksana bisa jadi mendatangkan kerugian bagi negara dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Hal-hal ini diakibatkan oleh kurangnya upaya peningkatan perekonomian penduduk lokal pemilik hak ulayat di wilayahnya. Dalam hal ini distrik Demta di Kabupaten Jayapura, sampai sekarang belum berkembang. Oleh karena itu peningkatan produksi pertanian secara lokal perlu mendapat perhatian. Salah satu caranya adalah upaya peningkatan peran penyuluhan, untuk itu perlu model penyuluhan yang sesuai bagi wilayah ini.

Model penyuluhan pertanian sendiri merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi proses adopsi dan difusi inovasi pertanian. Terutama model ini diperlukan dalam rangka diseminasi (penyebar luasan) inovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian balai penelitian (Balit) dan balai pengkajian

(BPTP) kepada pengguna teknologi. Terkait dengan itu maka perlu model penyuluhan yang sesuai di setiap wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Hal ini disadari betul sebagai salah satu faktor pembatas dalam proses alih teknologi, karena adanya keragaman budaya masyarakat pertanian di masing-masing wilayah pengembangan pertanian. Seperti apa yang diungkapkan Widjono (1999) bahwa alih teknologi di Papua harus memperhatikan budaya setempat yang terdapat pada kelembagaan-kelembagaan lokal.

Untuk itu, khusus Kabupaten Jayapura yang terdiri beberapa suku besar yang menyebar dalam beberapa wilayah distrik seperti Sentani Barat, Sentani Timur, Waybu, Moy, Depapre, Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Demta perlu dikaji kelembagaan-kelembagaan adat setempat yang masih eksis maupun yang telah lama mengalami degradasi nilai sosial budaya masyarakatnya karena masuknya nilai-nilai baru dari luar yang justru bukan membawa perubahan positif, tetapi malah sebaliknya menyebabkan merenggangnya hubungan antara individu-individu dalam sistem sosialnya, yang kemudian menyebabkan sulitnya diseminasi, adopsi, dan difusi inovasi teknologi pertanian ke dalam sistem usahatani masyarakat ini yang berakibat tidak berkembangnya usaha pertanian suku-suku di wilayah-wilayah tersebut.

Pengkajian ini bertujuan untuk memahami karakteristik masyarakat tani menurut spesifikasi inovasi pembangunan yang ditawarkan untuk diadopsi, dan juga mempelajari kemungkinan digunakannya kelembagaan adat di wilayah pengkajian untuk menyusun model alih teknologi (penyuluhan) yang sesuai bagi wilayah yang bersangkutan.

METODOLOGI

Landasan Pemikiran

Menurut Hubeis *et.al.* (1995), hampir semua program pembangunan berdimensi perubahan "perilaku manusia pembangunan", baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan "memasyarakatkan suatu inovasi pembangunan (gagasan, teknologi)", biasanya memerlukan dan melaksanakan penyuluhan pembangunan. Kegiatan penyuluhan pembangunan bertujuan untuk merubah pikiran, perasaan, dan tindakan orang-orang di masyarakat terhadap inovasi pembangunan. Dimensi ini merefleksikan keharusan para "pembawa pembaruan" (*agent of change*) untuk mampu memahami karakteristik khalayak sasaran (*end users*) menurut spesifikasi inovasi pembangunan yang ditawarkan untuk diadopsi.

Pemahaman "pembawa pembaruan" tentang karakteristik khalayak sasaran adalah prasyarat langkah menuju penentuan materi penyuluhan (jenis dan kedalaman pembahasan), metoda dan teknik penyuluhan yang akan dipakai, serta ketepatan waktu penyampaiannya. Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan dan etnis dengan sendirinya mencerminkan masyarakat yang majemuk. Kemajuan ini, tanpa dapat ditawar-tawar mengharuskan "pembawa pembaharuan" untuk mengantisipasi dalam pendekatan penyuluhan pembangunan yang digunakan.

Perbedaan karakteristik khalayak sasaran menyebabkan berbagai pihak melakukan kegiatan penyuluhan memerlukan rumusan materi penyuluhan, pendekatan penyuluhan, serta metode dan teknik penyuluhan yang juga spesifik. Karena itulah berbagai instansi pemerintah yang terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan penyuluhan pembangunan juga memiliki keunikan masing-masing dalam menentukan apa, bagaimana, kapan dan dimana berbagai materi dan pendekatan penyuluhan yang mereka pilih digunakan dan dimodifikasi jika perlu.

Selain itu untuk mengetahui sejauhmana program penyuluhan yang telah dilaksanakan dan sasaran yang dicapai, maka perlu adanya evaluasi. Disini evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan penyuluhan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif (BPLPP, 1990). Penyuluhan secara umum dijalankan melalui lembaga formal di desa di bawah kendali kepala desa sesuai pasal 10 UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa: "Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa” (Sajogyo dan Sajogyo, 2007).

Waktu dan Lokasi

Kegiatan pengkajian di Distrik Demta berlangsung selama 1 minggu, 10 – 20 Juli 2006, untuk mengumpulkan data dan informasi melalui kelembagaan adat suku-suku di Distrik Demta.

Metode Pengkajian

Pengkajian ini menggunakan metode survei dengan teknik FDG (*Focus Discussion Group*) dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Untuk grup diskusi diperlukan 6-8 anggota, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias data dan informasi akibat dari tidak fokusnya pemikiran pada suatu topik yang didiskusikan, karena terlalu banyaknya anggota. Penggalan data dan informasi menggunakan topik-topik yang telah ditentukan sebelumnya, seperti profil desa, struktur sosial, asal-usul struktur, pola dasar, gender, dan lain-lain.

Analisis dan Interpretasi Data

Data dianalisis dengan statistik sederhana dengan sistem tabulasi dan hasil analisis diinterpretasi secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Distrik Demta

Distrik Demta memiliki luas wilayah 331 km² dengan jumlah penduduk 6.212 jiwa (BPS Kabupaten Jayapura, 2005) sebelum mengalami pemekaran wilayah. Setelah pemekaran sekarang Distrik Demta terdiri dari 8 kampung yang didiami kurang lebih 38 marga atau suku, yang merupakan distrik induk untuk distrik pemekaran Yokari yang baru dimekarkan dalam Tahun 2006 ini. Nama ke-8 kampung atau bagian kampung dalam distrik Demta setelah pemekaran dan nama ke-38 marga/suku yang tersebar di dalam kampung ditunjukkan pada Tabel I.

Hasil survei AEZ (*Analisis Agro Ekologi Zone*) yang dilakukan BPTP Papua (2001) di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa arah pengembangan pertanian dalam arti luas untuk Distrik Demta meliputi pengembangan tanaman hutan seperti meranti, kruig, damar, benuang, rotan, bangkiran, dan ramin, untuk daerah dengan ketinggian 0 – 700 m dpl, sedangkan untuk ketinggian lebih dari 700 m dpl diarahkan untuk tanaman hutan eucalyptus, pinus, casuarina, lauraceae, quercus, castanae, nothofagus, rapanace, dan leptosnerrun. Pada daerah dataran rendah (0-700 m dpl) diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman keras lainnya seperti kopi robusta, kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, rambutan, nangka, durian dan duku. Diversifikasi tanaman dapat dilakukan dengan menerapkan budidaya pertanaman lorong dengan tanaman pangan yang meliputi kacang tanah, kedelai, dan jagung diantara tanaman perkebunan. Pengembangan tanaman pangan tidak direkomendasikan, karena tidak memiliki lahan dengan hamparan yang luas. Untuk kawasan Jayapura, distrik Demta ini merupakan salah satu dari tiga distrik yang diarahkan untuk pengembangan komoditas perikanan terutama bandeng, udang, dan kepiting.

Tabel I. Nama kampung, jumlah dan nama suku di distrik Demta, Tahun 2006

No.	Nama Kampung dan bagiannya	Jumlah Suku	Nama Suku/Marga
1.	Moris Besar	12	Sobi, Arim, Yakore, Mandai, Karai, Karifu, Morin, Sudumeru,, Kopou, Pararen, Tare, Jouwngang
2.	Moris Kecil	2	Yakwar, Burami
3.	Ambora Timur	2	Dodop, Ipungkwa
4.	Ambora Tengah	2	Tir, Ebe
5.	Ambora Barat	4	Darinya, Tunya, Karafir, Papiri
6.	Yogapsa	4	Usupar, Pica, Kossai, Ajam
7.	Kamdera (Tarfiah)	10	Daisiu, Ondi, Taudupun, Pitowin, Barnefu, Tawuwui, Wero, uri, Warnisiu
8	Muaib	2	Kekri, Waysimon
	Jumlah	38	

Distrik Demta setelah mengalami pemekaran memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Distrik Bonggo
- Sebelah Utara : Lautan Pasifik atau Lautan Teduh
- Sebelah Selatan : Gunung Mayei (Gunung tertinggi kedua setelah Cyclop di Kab. Jayapura)
- Sebelah Timur : Distrik Yokari (pemekaran dari Distrik Demta)

Karakteristik Identitas Petani Anggota Grup Diskusi

Anggota grup yang terpilih berasal dari 4 kampung atau bagiannya, yaitu Moris Kecil (Yakwar), Ambora bagian Timur (Dodop), Yogapsa (Pica), dan Ambora bagian Barat (Darinya). Umur responden anggota grup berkisar antara 50 tahun sampai 60 tahun dengan tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Tiap anggota grup memiliki jumlah anggota keluarga (istri, anak, suami, ayah, ibu, dan saudara) berkisar antara 6 sampai 12 orang. Tidak semua anggota grup berstatus sebagai petani (ada guru aktif dan pensiunan) tetapi pertanian merupakan pekerjaan yang selalu digeluti selain menangkap ikan di laut. Tiap rumah tangga memiliki lahan pekarangan yang berukuran kira-kira 0,5 hektar. Selain lahan pekarangan mereka juga memiliki lahan usaha komunal milik marga. Lahan komunal umumnya berkisar antara 5-10 hektar dan berjarak kurang lebih 1-10 km dari lokasi pemukiman. Tidak ada responden perempuan dalam diskusi ini, karena perempuan jarang diberi tempat dalam adat untuk berbicara terutama di para-para adat, seperti umumnya masyarakat adat Papua sebagaimana terjadi juga pada suku Malin di Merauke (Wamaer, 2007).

Menurut informan kunci, peran ondoafi masih didengar di kampung, tidak mudah untuk menggali informasi dari ondoafi-ondoafi sebagai tua-tua di kampung, jika tidak tahu cara mendekati mereka. Hal ini menunjukkan pendekatan sosial yang sesuai sangat dibutuhkan dalam menggali informasi yang lebih mendalam dan lebih jauh tentang adat istiadat masyarakat setempat yang menjadi sasaran terutama pada masyarakat yang masih memegang kuat adat istiadatnya.

Sejarah Pembentukan Kampung

Empat wilayah kampung yang dipilih sebagai lokasi studi bagi distrik Demta yaitu Moris Kecil, Ambora bagian Timur, Yogapsa, dan Ambora bagian Barat. Keempat daerah ini memiliki batas-batas yang tidak nampak jelas karena keempatnya sangat berdampingan atau berimpitan. Sekalipun demikian batas-batas hak ulayat suku-suku telah ditetapkan sendiri berdasarkan tanda-tanda alam seperti kali, batu besar, pohon besar, dan lain-lain.

Selanjutnya perkembangan kampung-kampung ini mengikuti sejarah perkembangan Papua, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda (1800-an) yang berkedudukan di Fakfak dan Manokwari, masuknya Injil di Demta (1900-an), perang Jepang atau perang Pasifik (1945), kembali berkuasanya Belanda (1945-

1962), dan akhirnya masuknya Indonesia dengan TRIKORA (1962 sampai sekarang). Pada jaman kolonial terbentuk distrik dan kampung pemimpin-pemimpin distrik disebut Bestuur sedang pemimpin kampung ini disebut Korano. Setelah bersatu dengan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan RI terbentuklah Kecamatan yang dikepalai Camat, dan Desa yang dipimpin Kepala Desa (Kades) sampai Tahun 2000 dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka secara khusus di Papua kembali menggunakan nama distrik menggantikan nama kecamatan dan kampung menggantikan nama desa.

Struktur Sosial Masyarakat

Masyarakat dari ke empat suku (Yakwar, Dodop, Pica, dan Darinya) di ke-empat kampung Distrik Demta, adalah orang-orang yang memahami betul adat-istiadat seperti para tua-tua sangat dihormati, dan telah membentuk struktur sosial sebagai orang-orang dihormati sebagai pemimpin adat. Di sini struktur sosialnya termasuk sturuktur sosial tertutup, sehinga kedudukan sebagai pemimpin adat (ondoafi) tidak bisa keluar dari garis keturunan suatu suku, dan jabatan ini secara otomatis melekat kepada saudara tertua dalam satu generasi yang umumnya jatuh pada kaum laki-laki.

Struktur kepemimpinan adat ini telah diperjelas dalam bentuk Dewan Adat Kampung (DAK) yang telah diresmikan melalui musyawarah Dewan Adat Papua (DAP) di tingkat provinsi dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini merupakan bentuk konsolidasi ondoafi-ondoafi dalam wadah DAK yang telah dikemas dalam bentuk organisasi modern dengan Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang yang meliputi bidang ekonomi (pertanian, perikanan, peternakan), sosial budaya (pengatur strategi, acara-acara ritual perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain). Tidak semua anggota keluarga dalam setiap marga, sekalipun memiliki jiwa kepemimpinan dapat menjadi ketua adat atau ondoafi dalam masyarakatnya, di sini yang terpilih adalah saudara tertua dalam keluarga besar suatu suku.

Struktur sosial masyarakat asli Demta berdasarkan bidang-bidang kehidupan dalam sistem sosial masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian suku-suku berdasarkan bidang kehidupan dalam sistem sosial masyarakat asli Demta, Tahun 2006

No.	Bidang-bidang	Suku-suku yang terlibat dan menguasai bidangnya
1.	Pertanian	Dodop, Tunya
2.	Perikanan	Pica, Ebe
3.	Strategi	Karafir
4.	Perdamaian	Semua suku memiliki tokoh pendamai

Struktur sosial seperti ini menunjukkan pula keahlian dalam bidang yang turun temurun dimiliki suku di Demta, yang berarti program pembangunan yang akan dirancang harus kompatibel dengan budaya masyarakat setempat (Widjono, 1999).

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat adat 4 suku di ke-empat lokasi tidak jelas, sehingga boleh dikatakan tidak ada kelas sosial karena jika menggunakan tingkat kehidupan yang lebih baik, yang diukur misalnya dari pendapatan, maka pada umumnya kelas sosial mereka sama. Tidak ada satu suku yang memiliki taraf hidup yang lebih menonjol dibanding suku lainnya, atau memiliki kekuasaan lebih tinggi dari suku lainnya. Akan tetapi secara budaya kepemimpinan dalam masyarakat, stratifikasi sosial berdasarkan keondoafian yang mengikuti garis keturunan.

Adat Istiadat Menyangkut Usahatani

Kegiatan usahatani dengan sistem perladangan berpindah merupakan kegiatan rutin yang dikerjakan suku-suku di Distrik Demta. Di dalam berusahaatani mereka juga memiliki norma-norma yang dipangku oleh pemangku adat khusus, sehingga masyarakat umum harus mentaati norma-norma tersebut jika ingin

usahatani mereka berhasil. Hal ini terlihat dari adanya semacam kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat ini, agar tidak mengganggu tanaman yang sedang dalam pertumbuhan, dengan melihat dari adanya ranting kayu, pelepah daun sagu, atau apa pun yang diberikan sebagai tanda pelarangan.

Dalam suatu kegiatan usahatani, sejak dulu telah ada kebiasaan dalam setiap suku, untuk menyepakati kapan mulai berkebun, pembagian lahan yang umumnya berupa lahan milik bersama (komunal) tiap suku. Jika satu suku mau berusahatani mereka terlebih dahulu memusyawarakannya, untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya percekocokan diantara warga satu suku.

Khusus perikanan, yang merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari suku-suku di Demta sebagai penduduk di kawasan pesisir, maka selain sebagai petani mereka juga adalah nelayan. Dalam kehidupan sebagai nelayan pun mereka memiliki norma-norma yang selalu diikuti. Norma-norma adat ini biasanya ditegakkan oleh pemangku adat khusus perikanan, yang dapat mengenal gejala-gejala alam dan meramalkan waktu yang tepat untuk usaha perburuan hasil laut. Selain itu menetapkan waktu dan tempat tertentu tidak boleh diganggu dengan memberi tanda larangan, kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis ini sangat ditaati masyarakat, bila telah diputuskan dalam suatu musyawarah, baik dalam suatu suku tertentu maupun dengan suku-suku lain. Kesepakatan-kesepakatan untuk sementara tidak memungut atau mencari hasil laut pada suatu areal tertentu ini disebut *sosi*. Pelarangan suatu areal, ditandai dengan penancapan daun kelapa pada bagian-bagian tertentu dari areal yang dilarang tersebut.

Untuk kegiatan rutin harian waktu ke kebun dan ke laut memiliki proporsi yang seimbang, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Proporsi waktu kerja dan kegiatan sosial pada suku-suku di distrik Demta, Tahun 2006

No.	Jenis Kegiatan	Proporsi waktu (%)
1.	Berkebun	40
2.	Melaut	40
3.	Kegiatan sosial	20
	Total	100

Motivasi Usahatani

Umumnya para petani mengusahakan tanaman pangan untuk dikonsumsi, sehingga produksi tanaman pangan hanya secukupnya untuk konsumsi, jika ada kelebihannya barulah dijual, yang biasanya hanya dijual di pasar distrik Demta. Sedang hasil-hasil yang dijual ke kota (pasar Kotaraja dan Hamadi di Jayapura) umumnya berupa hasil laut baik dalam bentuk ikan basah dengan menggunakan *coolbox*, atau ikan kering yang diasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi mereka dalam berusahatani untuk meningkatkan pendapatan masih rendah, dan lebih mengandalkan hasil penangkapan ikan langsung dari alam tanpa usaha budidaya.

Keragaan Usahatani

Ke empat lokasi, kampung Moris Kecil, Ambora bagian Timur, Ambora bagian Tengah, dan Yogapsa berada dalam agroekosistem lahan kering dataran rendah (LKDR). Usahatani di wilayah ini masih bersifat tradisional dengan sistem tebas bakar untuk pengusahaan komoditas umbi-umbian. Selain itu terdapat perkebunan rakyat untuk komoditas ekspor dengan luasan yang bervariasi antara 1-10 ha, seperti dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nama kampung lokasi pengembangan dan luas perkebunan di Distrik Demta Tahun 2006

No.	Nama Kampung	Komoditas yang dikembangkan	Luas (ha)
1.	Moris Besar	Pisang, kakao, vanili	2-3
2.	Moris kecil	Kakao	1-2
3.	Yogapsa	Cengkeh	10
4.	Ambora	Kakao, kopi	1-2
5.	Muaib	Kakao, kopi	5-10

Untuk vanili di kampung Moris Besar, salah satu petani yang mengusahakan kira-kira 1 ha, telah menikmati hasil vanili yang biasanya dijual seharga Rp 500.000/kg, dengan rata-rata produksi baru mencapai 10-50 kg tiap 3 bulan, akan tetapi tidak kontinu, sehingga belum bisa dijadikan sumber penghasilan tetap. Untuk kakao, petani pada umumnya baru memperoleh 150-200 kg per bulan untuk lahan seluas 1 ha, dengan harga kakao berkisar antara Rp 8.500 – Rp 10.000/kg dijual ke Sentani atau Jayapura.

Sedang cengkeh hanya terdapat di kampung Yogapsa dengan luasan yang masih tersisa 10 ha dari puluhan hektar yang ditanam sekitar Tahun 1975, pengembangan di kampung lain sudah ditebang dan diganti dengan tanaman kakao, karena harga cengkeh yang mulai jatuh sekitar tahun 1980-an dan sulit pula pemasarannya. Hasil produksi cengkeh yang ada berkisar 5-10 kg per minggu yang biasanya dijual secara terbatas sebagai bumbu masak di pasar Kotaraja dan Hamadi Jayapura. Harga setiap tumpuk Rp 3.000 – Rp 5.000.

Penguasaan lahan

Penguasaan lahan di ke-empat kampung masih merupakan sistem penguasaan secara komunal yang ditentukan masing-masing ondoafi kepada anggota masyarakat sukunya. Penguasaan komunal ini meliputi lahan pekarangan dan lahan usahatani dengan rata-rata pemilikan 0,5 hektar – 20 ha. Di luar lahan pemukiman sebagian masih berupa hutan tempat berburu, lahan usahatani yang diusahakan dengan sistem perladangan berpindah untuk komoditas pangan terutama keladi, talas, ubi jalar, ubi kayu, dan syafu/gembili dengan waktu berpindah setiap 2 tahun.

Dukungan sarana pertanian

Ketersediaan sarana pertanian berupa peralatan parang, kampak, sekop, dan bibit/benih tanaman tersedia, karena hubungan yang lancar dengan kota Jayapura. Kisaran pemilikan alat-alat pertanian pada masyarakat petani di Distrik Demta dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pemilikan alat pertanian di distrik Demta, Tahun 2006

No.	Jenis Alat	Kisaran pemilikan
1.	Parang	1-6
2.	Kampak	1-2
3.	Sabit	1-2
4.	Linggis	1-2
5.	Cangkul	1-2
6.	Dodos	1-2
7.	Tugal kayu	3-6
8.	Sekop	1-2

Jenis kampak yang ada selain untuk menebang pohon, juga kampak khusus untuk membuat perahu, hal ini terkait dengan kehidupan mereka selain sebagai petani juga sebagai nelayan. Untuk itu kerajinan pembuatan perahu merupakan salah satu keahlian mereka dibanding suku-suku lain seperti suku kemtuk-gresi dan genyem yang berada di pedalaman. Untuk tugal kayu, sesuai adat kebiasaan mereka memiliki kayu-kayu keras yang menurut nilai budaya cocok sebagai tugal, sehingga telah lama dipergunakan secara turun-temurun.

Pupuk dan pestisida sudah dikenal, namun belum dimanfaatkan karena kurangnya pemahaman di tingkat petani mengenai manfaat dan teknis pemakaian pupuk. Selain itu petani merasa belum perlu menggunakan pupuk untuk tanaman yang diusahakannya. Bibit ataupun benih beberapa tanaman lokal cukup tersedia di ladang petani seperti keladi, talas, gambili/syafu, tebu, dan ubi kayu.

Untuk kegiatan melaut/nelayan mereka juga memiliki perahu baik yang sudah menggunakan mesin (motor tempel) maupun yang belum. Untuk mesin ada yang mampu membeli sendiri, tetapi sebagian lagi merupakan bantuan pemerintah melalui Dinas Perikanan. Rata-rata pemilikan perahu tanpa motor 1-2 buah tiap nelayan, sedangkan perahu motor tiap kampung memiliki 3-5 buah.

Ketersediaan infrastruktur

Untuk menghubungkan Sentani sebagai ibu kota kabupaten Jayapura sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan sebagai pusat perekonomian dengan ibu kota distrik Demta telah dibangun jalan berjarak kira-kira 35 km dari Genyem (Nimbokrang) dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Ketiga kampung berada di pusat kota kecamatan Demta. Jalan utama Demta-Genyem telah rusak sehingga telah berubah menjadi jalan tanah, karena sering dilalui kendaraan berbobot berat melebihi kapasitas/kekuatan jalan aspal untuk menahan beban kendaraan milik perusahaan. Rusaknya jalan ini merupakan faktor penghambat dalam hal penjualan hasil pertanian ataupun hasil tangkapan nelayan ke kota Sentani maupun Jayapura. Sedangkan ruas jalan Genyem – Sentani sudah beraspal sehingga hubungan pada ruas ini lebih lancar. Jarak dari kota distrik Demta ke beberapa tempat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jarak dari kota Demta ke Beberapa Tempat

No.	Dari Demta ke	Jarak (km)
1.	Hamadi	120
2.	Sentani	60
3.	Genyem	35
4.	Ambora	1
5.	Moris Besar	4
6.	Tarfia/Kamdera	35
7.	Muaib	50

Dari distrik Demta ke kampung, Tarfia dan Muaib sudah ada jalan darat, tetapi orang lebih banyak menggunakan perahu motor sebagai alat angkut karena lebih dekat dan lebih murah dibandingkan dengan jalan darat. Untuk ongkos perahu motor dari Tarfia ke Demta atau sebaliknya dipasang tarif Rp 5.000/org, sedang jalan darat dengan menggunakan motor ojek Rp 50.000 – Rp 60.000 /org sekali jalan.

Selain prasarana jalan, terdapat juga fasilitas lain seperti pasar, pembangkit listrik, dan pelabuhan di ibu kota distrik Demta. Pasar distrik ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 6 sore, kecuali hari Minggu. Pelabuhan laut atau dermaga terdapat 2 buah yaitu, milik perusahaan kayu You Liem Sari dan perkebunan kelapa sawit Sinar Mas Lereh. Pelabuhan-pelabuhan ini ikut memberi tambahan pendapatan kepada penduduk Demta, bila ada kapal yang mekakukan bongkar muat hasil bumi berupa kayu gergajian dan minyak kelapa sawit (CPO). Adanya listrik di distrik dapat memudahkan dalam penyuluhan dengan menggunakan alat elektronik.

Hasil-Hasil Usahatani dan Hasil Bumi Lainnya

Umumnya komoditas pangan yang diusahakan di pekarangan antara lain gambili, keladi, ubi jalar, ubi kayu, kacang panjang, sawi, dan lainnya. Untuk lahan usaha komunal komoditas lokal yang diusahakan antara lain keladi, talas, syafu/gembili, ubi jalar, kelapa, dan sagu. Sagu ini merupakan sagu yang dibudidayakan. Sedangkan komoditas tanaman tahunan yang diintroduksi seperti durian, rambutan, kemiri, dan jeruk namun belum berkembang. Tanaman buah-buahan yang telah turun-temurun diusahakan adalah mangga, yang pada waktu tertentu hasilnya melimpah namun tidak laku sekalipun dibawa ke pasar.

Selain hasil-hasil usahatani, petani lokal di keempat lokasi studi ini pada umumnya meramu hasil hutan berupa daging babi hutan, daging rusa, dan hasil laut berupa berbagai jenis ikan. Pada umumnya hasil usahatani terutama keladi, talas, dan syafu diusahakan untuk tujuan konsumsi sedangkan hasil-hasil hutan umumnya untuk dijual. Untuk selanjutnya harga hasil-hasil usahatani dan hasil bumi lainnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Dari Tabel 7, ternyata harga-harga hasil pertanian dan hasil bumi lainnya di distrik Demta tidak berbeda dengan harga-harga di tingkat ibu kota kabupaten Jayapura (pasar Sentani) dan Kota Jayapura (pasar Youtefa-Kotaraja dan Hamadi-Jayapura). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi di distrik Demta cukup tinggi. Tingginya harga-harga ini cukup beralasan, karena tingginya ongkos angkutan umum dari Demta ke Sentani (Rp 20.000) dan Jayapura (Rp 25.000). Selain itu, juga tingginya harga barang-barang kebutuhan seperti beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng (Rp 6.500/liter), minyak tanah (Rp 5000/liter), minyak bensin murni (Rp 6.000/liter), bensin campur (Rp 6500/liter), dan barang kebutuhan lainnya yang didatangkan dari luar Papua. Menurut petani lokal jika mereka tidak menjual dengan harga tinggi seperti harga kota maka mereka tidak bisa belanja barang kebutuhan mereka seperti pakaian, sabun cuci, minyak tanah, biaya pendidikan anak, BBM, dan ongkos angkutan untuk urusan ke.

Kisaran pendapatan petani baik dari usahatani pertanian (talas, keladi, ubi kayu ubi jalar, sayur, pisang, jeruk, ayam, babi peliharaan) maupun hasil laut (ikan segar, ikan asar), dan hasil hutan (daging babi segar, dan sagu) di lokasi studi berkisar antara Rp 500.000 - Rp 900.000/bulan. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani relatif cukup tinggi, namun dengan melihat harga barang kebutuhan sehari-hari yang cukup tinggi, maka pendapatan petani tersebut belum cukup layak.

Tabel 7. Harga hasil usahatani dan hasil bumi lainnya di distrik Demta, Tahun 2006

No.	Jenis Komoditas	Satuan	Harga Satuan (Rp)
Pangan:			
1.	Keladi	Tumpuk	10.000
2.	Talas	Tumpuk	5.000
3.	Ubi kayu	Tumpuk	5.000
4.	Ubi jalar	Tumpuk	10.000
5.	Sagu	Karung	100.000
6.	Beras	Kg	5.000
Buah dan Sayur:			
1.	Pisang Ambon	Sisir	5.000
2.	Pisang Raja	Sisir	5.000
3.	Pisang Kokas	Sisir	3.000
4.	Pisang Sepatu	Sisir	3.000
5.	Mangga golek	Buah	10.000
6.	Mangga Arum Manis	Buah	5.000
7.	Mangga mana lagi	Buah	2.500
8.	Mangga kueni	Buah	2.500
9.	Mangga asam manis	tumpuk	1.000
10.	Bayam	Ikat	2.000
11.	Daun pepaya	Ikat	2.000
12.	Daun singkong	Ikat	3.000
13.	Kangkung	Ikat	3.000
14.	Kacang panjang	Ikat	3.000
Bumbu-bumbu:			
1.	Cabe rawit	Tumpuk	3.000
2.	Bawang putih	Tumpuk	3.000
3.	Bawang merah	Tumpuk	3.000
4.	Tomat	Tumpuk	2.000
Ikan:			
1.	Kombong	Tali	10.000
2.	Karang/demersal	Tali	50.000
3.	Tenggiri besar	Ekor	100.000
4.	Bubara besar	Ekor	100.000
Lainnya:			
1.	Pinang	Tumpuk	2.000
2.	Sirih	Ikat	5.000
3.	Kapur	Bungkus	2.000

Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan penyuluhan pertanian di keempat lokasi studi sudah diterapkan metode latihan dan kunjungan (Laku) menurut informasi dari instansi teknis, akan tetapi kunjungan petugas dinilai petani jarang melakukan penyuluhan. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan berhasil jika diberi petunjuk mengenai teknik bercocok tanam, dan bibit dibagikan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk berusaha, dengan memberikan penekanan pada pemenuhan bahan makanan pokok.

Petani lokal di kampung-kampung belum pernah dibina untuk menanam padi seperti transmigran nasional, akan tetapi sebagian besar dari mereka merasa tidak bisa mengolah tanah, karena menurut mereka itu terasa sangat berat. Menurut petani lokal itu semacam pemaksaan budaya karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka jalani. Sehingga mereka masih tetap berusaha dengan pola usahatani tradisional sistem perladangan berpindah dengan komoditas utama keladi, talas dan komoditas lain seperti tebu,

pisang, ubi jalar, ubi kayu. Sistem usahatani berpindah ini terkait dengan makin berkurangnya hara tanah karena tanaman tersebut sangat rakus hara.

Informasi yang diperoleh saat penelitian ini berlangsung adalah petani kurang mendapat perhatian dalam penyuluhan pertanian, ini terlihat dikarenakan bibit tanaman yang dibagikan seperti bibit durian, kakao, dan vanili selama ini tidak dikembangkan. Alasannya karena tidak dibimbing oleh penyuluh. Program penanaman tanaman seperti durian, vanili, maupun kakao, ternyata tidak berhasil di kampung-kampung di sekitar Demta, hal tersebut membuat mereka khawatir nantinya kurang diperhatikan pemerintah karena telah melalaikan program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa petani cukup sadar bahwa kegagalan mereka dalam menjalankan program pemerintah, akan berdampak kepada kelanjutan pembangunan di kampungnya. Oleh karena itu mereka selalu berusaha menjalankannya asalkan sesuai dengan kemampuan mereka dan terutama sekali budaya pertanian mereka.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penyuluhan

Penyuluhan yang selama ini dijalankan pada masyarakat suku-suku di Demta dinilai belum efektif karena banyak faktor. Dalam pengkajian ini ada tiga faktor yang bisa teridentifikasi, yaitu (1) kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan petani, (2) belum adanya program penyuluhan yang tepat untuk masyarakat lokal, dan (3) bahan atau materi apa yang perlu disuluhkan kepada petani lokal belum ditetapkan. Ketiga faktor tersebut telah diidentifikasi dalam kegiatan ini dengan berdasarkan pemahaman bahwa teknologi yang hendak disuluhkan benar-benar merupakan kebutuhan petani saat ini dan memiliki prospek untuk berkembang di masa mendatang. Selain itu dari sisi yang akan memberi penyuluhan bahan-bahan yang diperlukan benar-benar bisa diaktualisasikan penerapannya di lapangan.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, secara umum ditemui bahwa beberapa daerah dinilai masih kekurangan tenaga PPL, sehingga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi belum efektifnya penyuluhan pertanian. Hal ini menyebabkan pemerintah atau Departemen Pertanian pada Tahun 2006, memprogramkan penambahan 6000 tenaga PPL kontrakan yang diharapkan dapat menjawab kekurangan PPL selama ini (Sinar Tani, 2006).

Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan latihan dan kunjungan (laku) masih diinginkan oleh petani, karena petani masih perlu pendampingan akan tetapi mungkin perlu dimodifikasi. Pendekatan kelompok dapat dipakai untuk mendekati setiap marga. Hal ini terkait dengan sistem kepemilikan lahan yang masih bersifat komunal atau milik marga. Jika tidak bisa mendekati masyarakat lewat setiap suku karena terlalu banyak suku, maka keterlibatan setiap anggota suku untuk mewakili kelompoknya harus diperhatikan dalam setiap pembinaan yang melibatkan kelompok yang terbatas.

Pendekatan dengan sekolah lapang, demonstrasi plot, kunjungan masih diharapkan petani, disamping sistem magang. Namun perlu perhatian terhadap petugas lapangan. Perekrutan tenaga penyuluh untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap petani diharapkan direkrut dari putra daerah yang telah berpendidikan minimal SPMA atau tenaga yang mau melakukan pendampingan kepada petani.

Materi Penyuluhan

Sesuai dengan kesepakatan suku-suku di Demta materi penyuluhan harus menyangkut komoditas pangan lokal seperti tanaman talas, keladi, syafu, dan sagu sebagai pangan pokok. Sedangkan untuk meningkatkan ekonomi petani, pengembangan komoditas diarahkan untuk sayuran dan buah-buahan seperti vetsai, terong, kacang panjang, kol, jeruk, mangga, dan lain-lain. Selain itu penyuluhan juga perlu menyiapkan materi penyuluhan menyangkut pengembangan komoditas asli seperti nati dan buah merah, yang saat ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

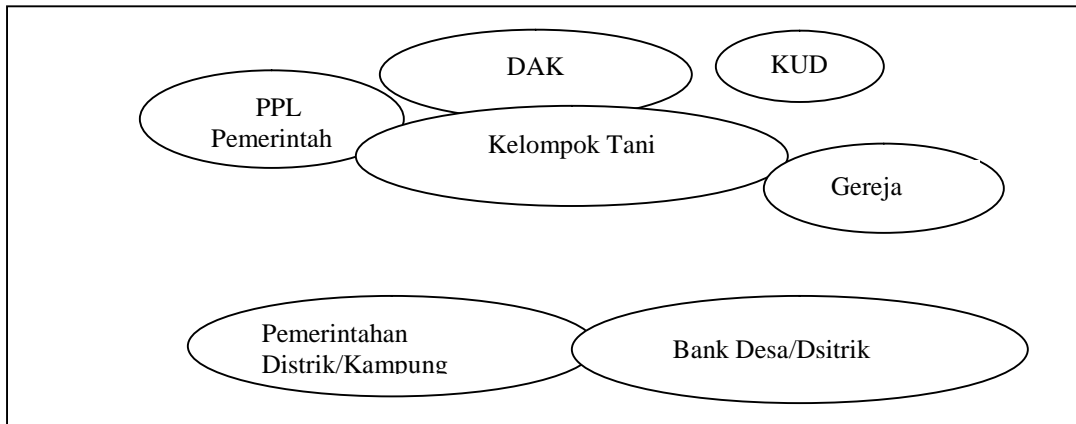
Menurut petani hasil produksi tanaman pangan lokal seperti keladi, talas, ubi jalar dan sayafu produksinya sudah sangat menurun dibandingkan dulu, faktor yang mempengaruhi produksi adalah semakin menurunnya kesuburan lahan. Peningkatan ekonomi petani melalui penyuluhan pertanian

diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku produktif melalui pengembangan usahatani yang akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada hasil hutan dan laut yang tentunya berdampak terhadap kelestarian lingkungan alamnya. Untuk itu kearifan lokal seperti sistem pelarangan secara adat “sosi” untuk tidak mengeksploitasi hasil bumi dan hasil laut secara berlebihan dengan menggunakan teknologi yang dapat merusak alam seperti rakitan bom untuk megebom ikan, tetapi perlu menghidupkan kembali atau tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasan sistem adat tersebut dalam rangka pelestarian lingkungan alam, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sampai ke anak cucu.

Keterkaitan Kelembagaan – Kelembagaan di Distrik Demta

Jenis kelembagaan yang telah ada di Distrik Demta dan berkaitan dengan usahatani yaitu Dewan Adat Kampung (DAK) Demta, PPL dan, Kelompok Tani (6 Kelompok). Selain itu ada pula lembaga keagamaan (gereja Katolik dan Protestan – Gereja Kristen Injili, Bethel, Advent, Gereja Pantekosta) yang tidak berhubungan langsung dengan usahatani. Dari 6 kelembagaan usahatani (kelompok tani) hubungan dengan PPL cukup erat, dan saat ini sedang dilakukan peninjauan untuk menghubungkan DAK dengan 6 kelompok tani tersebut. Karena DAK baru saja terbentuk bulan Juni 2006 dalam musyawarah Dewan Adat Papua (DAP).

Keterkaitan jenis kelembagaan yang ada dengan kegiatan usahatani yang dilakukan dapat dilihat pada gambar I.



Gambar I. Keterkaitan jenis kelembagaan yang ada dengan kegiatan usahatani

Pada gambar I, terlihat bahwa kelompok tani yang ada memiliki hubungan yang cukup besar dengan kegiatan usahatani yang dilakukan, tetapi hubungannya dengan PPL sangat kecil disebabkan karena PPL tidak aktif melakukan sistem Laku (Latihan dan Kunjungan) yang sebenarnya sangat diinginkan oleh petani. Dari hasil wawancara petani sebenarnya senang dengan kehadiran PPL, karena dalam melakukan kegiatan usahatannya mulai dari saat penanaman sampai panen petani mengharapkan adanya pendampingan. Sedangkan DAK Demta memiliki keterkaitan dengan kegiatan usahatani, terbatas pada pembagian lahan dan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan usahatani dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Terlihat juga pada gambar I, bahwa tidak ada keterkaitan antara kelompok Tani dengan lembaga keuangan perbankan (Bank Papua- Unit Desa), karena sampai saat berlangsungnya pengkajian ini belum tersedia skim kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan usahatani. Tetapi justru ada keterkaitan antara lembaga gereja dengan kelompok tani, yang terjalin melalui pemanfaatan tenaga kerja dari unsur-unsur gereja seperti kaum ibu, kaum bapa, dan pemuda dalam pembukaan lahan usahatani, dengan sistem upah yang akan masuk ke kas gereja.

Kelembagaan DAK, menurut tua-tua adat terbentuk dengan tujuan mendukung program pengembangan kampung di distrik Demta untuk merespon terbentuknya MRP (Majelis Rakyat Papua), sehingga masyarakat adat suku dapat ikut terlibat dalam pembangunan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan keadaan mereka sekarang. Konsep kesejahteraan menurut mereka (tua-tua adat), setiap individu dalam suku-suku dan masyarakat umum hidup berdampingan secara damai tanpa konflik, ada toleransi (yang tidak boleh hanya diharapkan dari satu pihak) untuk mendukung kebersamaan mencapai kesejahteraan tersebut dalam setiap tingkatan pemerintahan mulai dari kampung, distrik, kabupaten sampai provinsi.

Untuk mendukung tujuan DAK tersebut, maka setiap individu perlu tahu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan mengembangkannya. Jika ada nilai-nilai dan norma-norma yang telah pudar karena masuknya nilai-nilai budaya baru dari luar, maka DAS/K akan berfungsi untuk mengingatkan dan mempertahankan, termasuk aturan-aturan pemerintah yang tidak mengakomodir kepentingan adat perlu ditinjau kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan aspirasi masyarakat adat ini melalui MRP sesuai mekanisme yang berlaku dalam era otonomi khusus Papua sekarang ini. Kelembagaan DAK lewat *ondoafi-ondoafi* berkewajiban menguatkan nilai-nilai dan norma-norma adat yang telah berlaku secara turun temurun dalam sistem sosial mereka.

Untuk itu DAK telah menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang advokasi HAM, untuk mendapat pelayanan advokasi agar DAK bisa ikut berkiprah dalam pengembangan masyarakat suku-suku atau kampung di distrik Demta tanpa takut mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah sebagai penguasa. Atau dapat dikatakan disini bahwa kelembagaan adat sedang mencari posisi tawar dengan pemerintah agar memperoleh kewenangan yang lebih leluasa untuk mengatur masyarakat sesuai adat dan budaya masyarakat setempat sejalan dengan otonomi khusus Papua.

DAK Demta juga sangat mendukung program lembaga penyuluhan pertanian (BPP) di kampung-kampung, terlihat dari program penyuluhan telah dibicarakan dengan masyarakat suku di para-para adat sebagai kuorum tertinggi dalam masyarakat adat. Hal ini menjadi langkah awal yang baik bagi kemungkinan terjadinya adopsi dan difusi inovasi melalui DAK jika BPTP akan melakukan pengkajian maupun diseminasi di wilayah ini. menurut Syam, et al., (1999), masyarakat Nimbokrang (\pm 35 km dari Demta) merespon dengan baik sistem usahatani lahan kering yang dikembangkan dalam suatu pengkajian.

Keberadaan Kelompok Tani

Keberadaan kelompok tani di Distrik Demta yang dibentuk Tahun 1992 sesuai dengan program Gersatera (Gerakan Desa Sejahtera) mengikuti perjalanan program, sehingga kelompok tersebut bubar setelah berakhirnya program. Kelompok tani yang masih berjalan dengan baik sampai sekarang merupakan kelompok yang terbentuk melalui program PRT (Pertanian Rakyat Terpadu) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan usahatani kurang mendukung terhadap aktivitas kegiatan penyuluhan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan akses masyarakat dengan instansi dinas terkait sangat rendah. Berdasarkan data Dinas TPH Kabupaten Jayapura telah terbentuk sebanyak 7 kelompok tani (Klitan), tetapi 1 kelompok sudah masuk dalam distrik pemekaran Yokari, sehingga kini tinggal 6 keltan. Namun banyak dari kelompok tani tersebut tidak berjalan dengan baik dan sampai dengan Tahun 2006 ini terbentuk Kelompok Tani di Distrik Demta setelah pemekaran distrik, seperti ditunjukkan Tabel 8. Kelompok Wanita Tani yang pernah terbentuk di setiap kampung, tidak aktif lagi karena tidak ada pembinaan dari petugas akibat dari tidak adanya program pembinaan yang dijadikan acuan.

Tabel 8. Nama Keltan, jumlah anggota, suku-suku yang terlibat, luas lahan, dan jenis komoditas yang ingin dikembangkan

Nama Kelompok	Suku-Suku	Jumlah Anggota (org)	Luas Lahan (ha)	Jenis Komoditas
1.Ninggaum	Pica	20	5	Palawija, kakao
2.Umar Ugwi	Tunya	30	10	Palawija, kakao
3.Tjaa	Ebe	25	20	Palawija, kakao
4.Wambu	Tir	30	10	Palawija, kakao
5.Mamtap Jaya	Dodop	20	10	Palawija, kakao
6.Pancakor	Kosai, Usupar	30	10	Palawija, kakao

Persepsi Petani Pada Kegiatan Usahatani dan Penyuluhan Pertanian

Pada dasarnya petani beranggapan bahwa kegiatan usahatani dapat memberikan kesejahteraan, namun mereka kurang tekun mengusahakan komoditas tertentu yang memerlukan pemeliharaan yang intensif. Komoditas yang lebih sesuai bagi mereka adalah yang tidak memerlukan pemeliharaan intensif. Selain itu teknologi yang diinginkan adalah yang bersifat praktis, yang hanya membutuhkan pemikiran dan pemahaman yang sederhana.

Kegiatan penyuluhan pertanian perlu ada, seperti yang dinyatakan oleh responden yaitu ” kami sangat senang adanya penyuluhan ” asal petugas tersebut ada di sekitar kami, dan kalau dapat berasal dari suku kami sendiri. Untuk informasi teknologi pertanian yang dimiliki, menurut mereka teknologi tersebut perlu di diseminasikan ke petani lain, dan jika transfer teknologi berjalan secara simultan dan sinergis maka pemberdayaan kampung yang dilaksanakan dalam era otonomi khusus Papua dapat tercapai sasarannya.

Alternatif Model Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di kampung Ambora, yang penduduknya terdiri dari beberapa suku dalam masyarakat Demta dalam lingkungan masyarakat Tanah Merah, sistem metode penyuluhan yang diinginkan adalah bersifat langsung, komunikasi Interpersonal, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi interpersonal antara lain melalui metode kursus, demonstrasi cara, demonstrasi plot, Magang, dan sekolah lapang. Sedangkan untuk alternatif penyuluhan melalui komunikasi media massa yaitu melalui metode siaran radio dan siaran TV. Pada komunikasi media masa melalui siaran radio dan TV bisa mempermudah alih teknologi karena umumnya petani telah memiliki radio dan TV. Selain itu dapat pula menggunakan media CD, karena umumnya petani sudah memiliki fasilitas tersebut. Pemerintah juga dapat memfasilitasi masyarakat, dengan memberikan bantuan radio dan TV yang ditempatkan di tokoh – tokoh masyarakat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

Kesimpulan

Distrik Demta didiami oleh berbagai suku antara lain Suku Asli Demta (38 suku/marga/klan) dan juga suku dari luar daerah Demta seperti Yapen Waropen, Biak Numfor, suku Toraja, suku Bugis, dan Ambon. Penduduk Demta termasuk kategori usia produktif yaitu berkisar anatar 27 – 50 tahun, dengan tingkat pendidikan terendah SD dan tertinggi SLTA, dimana mata pencaharian yang utama yaitu bertani dan nelayan, menokok sagu, dan usahatani sampingan yang dominan yaitu tanaman perkebunan.

Penguasaan lahan usahatani berkisar antara 5 - 20 ha tiap suku. Penguasaan lahan merupakan penguasaan secara komunal masing-masing suku. Agar penyuluhan efektif maka selain dukungan sarana pertanian berupa parang dan kampak, juga perlu dukungan modalan tidak.

Kelembagaan usahatani yang ada diantaranya DAK Demta, Kelompok Tani yang dibentuk dan ditata berdasarkan suku-suku yang dibentuk BPP/ PPL, dan sebagian besar kelompok tani mempunyai hubungan erat dengan kegiatan usahatani yang dilakukan.

Komoditas yang diusahakan yaitu untuk perkebunan seperti kakao, cengkeh, kelapa dalam, dan pinang, serta komoditas pangan dan hortikultura meliputi kacang tanah, kacang hijau, kedele, kacang panjang, kol kepala, sawi, kangkung darat, nangka, rambutan, salak, durian, pisang, keladi, talas, syafu, ubi kayu, dan ubi jalar Tingkat pendapatan dari hasil usahatani sebagian besar diperoleh dari hasil nelayan dan menokok sagu. Sedangkan dari hasil usahatani perkebunan selama ini hanya bersumber dari hasil panen kelapa dalam, pinang dan sumber dari hasil pangan seperti pisang dan mangga.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan dari hasil survei melalui pendekatan PRA ada beberapa alternatif penyuluhan yang dapat diterapkan pada suku-suku di Demta yaitu penyuluhan media interpersonal dan penyuluhan melalui media massa. Diharapkan dengan diterapkannya model penyuluhan ini pada suku-suku di Demta dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program bidang penyuluhan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Alternatif penyuluhan yang perlu dilakukan terhadap masyarakat Demta dengan penyuluhan media interpersonal, antara lain kursus tani, magang, sekolah lapang, demonstrasi cara, demonstrasi plot dan demonstrasi skala luas. Selain itu perlu dilakukan metode penyuluhan melalui media masa antara lain melalui siaran pedesaan, dan siaran TV tetapi penyuluhan melalui metode tersebut perlu difasilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPLPP. 1990. Monitoring dan Evaluasi, terjemahan dari buku "Monitoring and Evaluation Guiding Principles", terbitan IFAD, Rome, 1984 hlm. 4-8.
- BPS Kabupaten Jayapura. 2005. Kabupaten Jayapura Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Jayapura.
- Harrison, L.E., dan S. P. Huntington. 2006. Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Hubeis, H.V.S., P. Tjitropranoto, dan W. Ruwiyanto. 1995. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI. Cetakan ke-IV. Penerbit PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Sajogyo dan P. Sajogyo. 2007. Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan, Jilid II. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sinar Tani. 2006. Dicari 6 ribu Tenaga PPL Kontrak. Sinar Tani Edisi 2 – 8 Agustus 2006 No. 3161 Th. XXXVI.
- Syam, A., S. Saenong, dan Dj. Baco. 1999. Sistem Usahatani Tanaman Pangan pada Agroekosistem Lahan Kering di Nimbokrang dalam Hasil-Hasil Penelitian SADP. Proyek Penelitian Sistem Usahatani Irian Jaya/ Sustainable Agriculture Development Project.
- Uncen. 1991. Laporan Penelitian Penyusunan Peta Sosial Budaya Irian Jaya. Pusat Penelitian Universitas Cenderawasih. Jayapura.
- Wamaer, D. 2007. Penyuluhan Pertanian di Merauke: Kasus Distrik Sota sebagai Tanaman Nasional dan Wilayah Perbatasan. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SEPA) Vol. 3 No. 2 Februari 2007, hlm. 84-95. Kerjasama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan PERHEPI komisariat Surakarta.
- Widjono, A. 1999^a. Analisis Alih Teknologi Pertanian dalam Skema SADP: di Merauke dan Manokwari dalam Hasil-Hasil Penelitian SADP. Proyek Penelitian Sistem Usahatani Irian Jaya/ Sustainable Agriculture Development Project.
- Widjono, A. 1999^b. Analisis Alih Teknologi Pertanian Bagi Masyarakat Asli Irian Jaya: Kasus beberapa desa di Sorong dalam Hasil-Hasil Penelitian SADP. Proyek Penelitian Sistem Usahatani Irian Jaya/ Sustainable Agriculture Development Project.